

## SUMMARY DISTRICT CITIZEN ENGAGEMENT PLAN

## PROPINSI NUSA TENGGARAN TIMUR – PULAU SUMBA

## Kabupaten Sumba Timur

## Visi Kabupaten

## Visi Besar Sumba Timur Impian

*Matawai Amahu Pada Njara Hammu: Tana Pari Peku – Luku Wai Kalala: Mata air emas, Padang Rumput yang hijau; Tanah yang subur dan makmur - Sungai yang airnya menyuburkan dan menyejukkan.*

*Uhuk Hama Pandak, Ndolak Hama Jangga: Duduk sama rendah, Berdiri sama tinggi. Sumba Rumah Tuhan.*

Warga negara beserta organisasinya: insan-insan Sumba Timur, adalah pemilik dan salah satu pilar utama yang dapat menegakkan demokrasi yang kuat dan berkesinambungan. Warga negara, segenap insan Sumba Timur, terutama orang miskin, perempuan, kaum muda dan kaum marginal lainnya, secara kolektif, mampu memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya sebagai warga serta mempertahankan identitasnya melalui membangun relasi dan interaksi sosial di lingkungan komunitasnya dan mengorganisir diri dengan bergabung dengan organisasi di komunitasnya atau membentuk organisasi baru atau bergabung/berafiliasi pada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang lebih besar.

Melalui interaksi yang terus menerus dan mengorganisir diri dalam komunitasnya dan melembaga, maka warga, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya memperoleh pengetahuan dan dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Warga mampu berpikir kritis untuk menilai semua kebijakan pemerintahan yang berdampak pada kehidupannya. Warga dan organisasinya berdaya dan memiliki posisi tawar yang kuat untuk melakukan interaksi, negosiasi dan lobi dengan para pengambil keputusan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang populis (kebijakan yang berpihak pada orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya) maupun dengan dunia usaha swasta yang akan berinvestasi-melakukan ekspansi modal di wilayahnya. Warga, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya terlibat aktif dalam setiap ruang, proses dan tahapan pembangunan dan juga dalam pengambilan keputusan, baik yang berhubungan dengan negara (pemerintahan) maupun yang berhubungan dengan urusan sosial kemasyarakatan (keluarga, adat isitiadat, agama, organisasi sosial, dan lain-lain).

Warga mampu mendayagunakan semua potensi/asset di komunitas dan lingkungan sekitarnya secara bertanggung jawab, kreatif, inovatif dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pendayagunaan semua asset diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warga, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan serta pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Warga menjadi pemilik atau “tuan” atas sumber-sumber daya alam yang ada di daerahnya, seperti tanah beserta kekayaan alam yang ada di dalam dan di atas tanah, antara lain bahan-bahan tambang, hutan dan margasatwa, air tawar dan air laut beserta isinya serta ruang angkasa. Siapapun atau organisasi/institusi manapun dari luar, yang berencana mendayagunakan-mengeksploitasi sumber-sumber daya alam milik warga dan/atau komunitas, mereka harus terlebih dahulu mendapat izin pengelolaan secara tertulis dari warga/organisasi

warga, dan berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan dan asset-asset warga lainnya. Warga, terutama pemilik ternak (kuda, kerbau, sapi, kambing dan babi, serta jenis-jenis ternak lainnya) memiliki sistem pemeliharaan ternak yang intensif, terintegrasi dan berperspektif lingkungan. Warga berdaulat, berdaya dan menjadi mandiri untuk mengelola sumber-sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan komunitasnya.

Warga, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya mengetahui, menyadari dan mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat, mengontrol kesehatan secara teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi agar anak-anaknya terbebas dari ancaman gizi buruk dan busung lapar. Ibu-ibu hamil dan yang melahirkan mendapat perawatan kesehatan secara cepat, terjangkau, murah dan berkualitas. Warga semakin menyadari dan bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas-fasilitas publik seperti fasilitas air bersih dan irigasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas penerangan dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Selain itu, semua anak, mendapat pendidikan yang layak, murah dan berkualitas, terutama pendidikan dasar (SD dan SMP).

Warga, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya, berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemanfaatan tata ruang yang berperspektif lingkungan, proaktif menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya serta melapor kepada pihak yang berwajib semua pelanggaran hukum atau tindakan kriminal yang terjadi. Warga menjadi lebih sadar dan taat hukum, baik terhadap hukum negara, agama maupun adat. Warga beserta organisasinya mampu menyelesaikan konflik-konflik di lingkungannya dengan cara-cara damai dan mengedepankan pendekatan berbasis budaya dan adat istiadat. Warga beserta organisasinya mempraktekkan budaya toleransi, menghargai keberanekaragaman perbedaan, baik yang berbasis suku, agama, ras, golongan, gender maupun kepentingan-kepentingan politik. Warga mempraktekkan dan mempromosikan nilai dan prinsip partisipasi, akuntabilitas serta menjunjung tinggi moralitas, etika dan spiritualitas dalam kehidupannya.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) beserta anggota-anggotanya: merupakan salah satu aktor utama dari tata pemerintahan yang baik dan demokratis, selain pemerintahan (negara) dan dunia usaha swasta (pasar). Masyarakat sipil dan organisasinya merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong dan menegakkan demokrasi yang kuat dan demokratisasi. OMS dan anggota-anggotanya mampu secara konsisten mempraktekkan dan mempromosikan komitmen untuk berperilaku dan bertindak demokratis serta membangun relasi dan interaksi yang dinamis, egaliter dan setara dalam organisasinya dan dengan kelompok kepentingannya (konstituen utamanya), serta secara konsisten memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggotanya, organisasi serta konstituennya.

OMS secara terus menerus membangun kapasitas organisasi dan anggotanya untuk keberlanjutan organisasinya dan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai untuk perubahan yang berdampak pada orang miskin, perempuan, kaum muda dan kaum marginal lainnya. OMS bekerja langsung di akar rumput, menjadikannya lebih berakar pada masyarakat yang dilayani. Inilah yang membangun fondasi bagi legitimasi sosial terhadap eksistensi OMS dalam kiprahnya. OMS membantu berbagai organisasi berbasis masyarakat beserta anggota-anggotanya yang mereka layani, agar warga dan organisasinya menjadi lebih berpengetahuan, terampil, dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan, nilai-nilai dan identitasnya.

OMS bekerja langsung di akar rumput, mendorong para anggotanya untuk berpartisipasi lebih penuh, mengambil tanggung jawab, untuk menegakkan akuntabilitas kepemimpinan mereka, mengelola konflik, dan dapat mengadvokasi keadilan sosial dengan cara-cara yang damai. OMS dan anggota-anggotanya dapat mengambil peran sebagai fasilitator, mediator dan negosiator dalam menyerap kepentingan-kepentingan konstituennya dan bersama dengan warga dan organisasinya meneruskannya kepada pembuat dan pengambil kebijakan. OMS mampu melakukan interaksi yang

dinamis dengan agenda-agenda pemerintahan seperti berpartisipasi dan mengawasi setiap tahapan dan proses pembuatan kebijakan, menilai kebijakan-kebijakan publik, memobilisasi asset-asset yang ada secara efektif untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan warga negara atau konstituennya. OMS juga mampu berperan sebagai sistem yang mendukung (*supporting system*) kerja-kerja pengorganisasi masyarakat di akar rumput dan kerja garda depan (*front line*) untuk perubahan kebijakan agar berpihak pada orang miskin, perempuan, kaum muda dan kaum yang kurang berdaya lainnya. OMS mampu menyuarakan kepentingan dari *voice of the voiceless people*, menjadi corong yang efektif dan agen transformasi sosial yang tangguh, militan dan semakin diapresiasi dan diakui kekuatan, posisi tawar dan legitimasinya.

OMS, terutama instansi agama dan anggota-anggotanya menjadi figur panutan bagi masyarakat dalam mempraktekkan dan mempromosikan nilai-nilai moralitas, etika, toleransi, pluralisme, multikulturalisme, keberimanan dan kebertagwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa. Institusi agama semakin proaktif dalam memfasilitasi dialog lintas agama dan kepercayaan serta memberi ruang bagi kelompok agama minoritas dan aliran kepercayaan untuk mempraktekkan ajaran agama atau kepercayaannya secara bebas tanpa tekanan. Institusi agama dan anggota-anggotanya menjadi mediator antara umat/jemaatnya dengan pemerintahan dalam upaya untuk memperjuangkan kepentingan umatnya.

OMS mengapresiasi dan senantiasa mendemonstrasikan serta mempromosikan nilai-nilai dan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kehidupan pribadi maupun organisasi.

**Jaringan antara OMS:** merupakan kekuatan kolektif dari kekuatan OMS yang lebih besar dan luas, bersifat lintas gender, lintas sektor dan isu, dan lintas aktor untuk mengkawal dan menegakkan demokrasi yang kuat dan demokratisasi. Jaringan antar OMS mempromosikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai partisipannya untuk mendorong perubahan yang berdampak pada orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya.

Jaringan antara OMS mampu memainkan peran dan fungsi yang lebih strategis terutama dalam memperjuangkan lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berpihak pada orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum yang kurang berdaya lainnya serta kelompok masyarakat yang lebih luas. Jaringan antara OMS mampu membuka akses dan melakukan interaksi yang dinamis dengan agenda-agenda pemerintahan seperti berpartisipasi dan mengawasi setiap tahapan dan proses pembuatan kebijakan, mengkaji dan menilai kebijakan-kebijakan publik yang berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat, mengajukan konsep atau naskah akademik kepada pembuat dan pengambil kebijakan untuk mempengaruhi isi atau muatan kebijakan/hukum (*content of law*), struktur kebijakan/hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*) agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok marginal lainnya. Jaringan OMS mampu mendorong lahir dan bekerjanya ruang dialog pembelajaran sosial multi-stakeholders untuk membagi gagasan, sebagai wadah untuk proses belajar dan belajar proses bersama, membagi peran dan membangun solidaritas, kesadaran dan *trust* kolektif untuk perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Jaringan antara OMS mampu mencari dan memproduksi pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk memberikan layanan yang bermutu tinggi dalam pengembangan kapasitas bagi OMS partisipan, warga dan bahkan pemerintahan dan dunia usaha swasta. Jaringan antara OMS mampu menciptakan inovasi-inovasi advokasi kebijakan, media-media kreatif dan inovatif untuk kampanye publik dan membuka jaringan kemitraan yang lebih luas baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

Jaringan antara OMS mampu mendemonstrasikan dan memperjuangkan budaya toleransi, terbuka pada perubahan, dan menghargai keberanekaragaman ideologi, perbedaan, baik yang berbasis

suku, agama, ras, golongan, gender maupun kepentingan-kepentingan politik. Jaringan antara OMS senantiasa apresiatif, menegakkan dan mempromosikan nilai dan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan sosial dan berperspektif lingkungan.

Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) pada setiap level: merupakan penyangga utama untuk menegakkan demokrasi dan demokratisasi. Pemerintahan juga merupakan salah aktor utama yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam upaya mendorong Tata Pemerintahan Lokal yang baik dan demokratis. Pemerintahan beserta aparatnya mampu secara konsisten mempraktekkan dan mempromosikan komitmen untuk berperilaku dan bertindak demokratis serta membangun relasi dan interaksi yang dinamis, egaliter dan setara dalam organisasinya, antara instansi pemerintahan dan non-pemerintahan, serta secara konsisten memproduksi kebijakan-kebijakan dan program-program yang memberikan prioritas utama dan berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya.

Aparat pemerintahan semakin disiplin, profesional, bertanggung jawab dan memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pemerintahan pada berbagai tingkatan semakin merakyat, apresiatif dan berkomitmen untuk lebih responsif, sensitif, akomodatif dan akuntabel pada asosiasi warga dan OMS yang terorganisir dan terlembaga yang melaksanakan dan memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya serta sipil dan politiknya. Pemerintahan mampu menjamin dan memastikan kualitas, akuntabilitas dan transparansi dari setiap pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat. Pemerintah menjamin dan membuka ruang bagi pengawasan yang lebih luas oleh warga dan organisasi warga, OMS dan jaringan terhadap pelayanan publik. Pemerintahan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) seperti pendidikan, kesehatan, penerangan, air bersih dan sanitasi, dan lain-lain. Pemerintah menciptakan dan beroperasinya sistem dan mekanisme untuk dapat menyerap aspirasi dan menampung pengaduan masyarakat atas kinerja (*performance*) pelayanan publik. Pemerintah memastikan transparansi dan akuntabilitas dipraktekan oleh para aparat pemerintahan di setiap kantornya dan agen-agen pelayanan publik mitra pemerintahan.

Pemerintahan pada berbagai tingkatan mampu mempraktekkan, mempromosikan dan memastikan partisipasi yang luas dari warga negara, terutama partisipasi orang miskin, perempuan, kaum muda dan kaum marginal lainnya dalam setiap tahap dan proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Pemerintah mampu memfasilitasi dan menyediakan anggaran bagi pemerintah desa untuk menyusun RPJM Desa. Semua desa memiliki dokumen RPJM Desa. Pemerintah menjamin dan membuat Perda agar setiap pembangunan di desa harus merujuk pada dokumen RPJM Desa. Pemerintah memberikan ruang bagi perwakilan/delegasi dari pemerintah desa dan kecamatan dan OMS untuk mengkawal dan menghadiri penyusunan perencanaan pada forum SKPD dan Musrenbangkab. Dokumen RPJM Kabupaten Sumba Timur disusun berdasarkan semua dokumen RPJM Desa di Kabupaten Sumba Timur. DPRD dan pemerintah memprioritaskan anggaran pembangunan yang berpihak bagi orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya. Pemerintahan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara atas akses informasi; hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, pakaian dan perumahan; hak untuk mendapat jaminan sosial termasuk asuransi sosial; hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar yang gratis; hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; hak untuk berkumpul dan berserikat dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Pemerintahan menjamin perlindungan terhadap asset-asset lokal baik asset ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial dan budaya, maupun asset teknologi dari ancaman kapitalisme global.

Dunia Usaha Swasta: turut mempromosikan dan mendemonstrasikan nilai-nilai partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam organisasinya. Memiliki kepedulian, sensitivitas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama, orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya. Dunia usaha swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) semakin gencar mendemonstrasikan dan mempromosikan praktek bisnis sosial, kewirausahaan sosial dan turut serta menyediakan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat (terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya), akan pangan, sandang, perumahan serta pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi serta peningkatan ekonomi rakyat melalui penyediaan akses terhadap modal usaha dan bantuan-bantuan teknis lainnya.

### Agenda Bersama

1. Akses dan Pelayanan Kesehatan yang cepat, murah, mudah, terjangkau dan berkualitas.
2. Akses dan Pelayanan Pendidikan yang terjangkau, murah dan berkualitas, (terutama bagi perempuan, orang miskin dan kaum marginal lainnya).
3. Tata Kelola Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan yang partisipatif dan berpihak pada orang miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya.
4. Penguatan Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan
5. Akses dan Kebijakan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan Gender
6. Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan dan Program Pembangunan (Penyadaran, Internalisasi dan Praktek Nilai dan Prinsip Keadilan Gender dalam Seluruh Aspek Kehidupan)
7. Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan
8. Memperkuat Forum dan Jaringan Kemitraan Multi-Stakeholders
9. Penegakan/Supremasi Hukum
10. Kedaulatan Pangan

### Summary Concept Paper

**Kabupaten** : Sumba Timur  
**Nama Lembaga** : YAL (Yayasan Alam Lestari)  
**Judul** : Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan (konsep kios barter sebagai sebuah model dalam proses penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal)  
**Durasi Program** : 3 tahun

Konsep paper bertujuan melihat warga miskin dan perempuan di desa berorganisasi, mengembangkan model ekonomi pedesaan "koperasi barter" yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Melalui organisasinya, warga secara aktif menggerakkan aset sosial dan ekonomi dalam desa untuk meningkatkan kualitas hidup, memiliki strategi yang inovatif dalam berkompetisi dengan pasar, mendorong pemerintah desa mengakomodir konsep koperasi barter dalam RPJMdes dan pemerintah kabupaten melahirkan kebijakan dan program yang memperkuat koperasi barter, mengembangkan organisasinya sebagai organisasi yang efektif dan menerapkan nilai-nilai partisipasi, demokrasi, transparansi, akuntabel, dan kesetaraan gender. Yayasan Alam Lestari akan mengembangkan strategi penguatan kapasitas, pendampingan, kampanye /promosi dan

mengembangkan pembelajaran bersama. Program merencanakan akan bekerja dengan Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan. Rencana aksi ini diperkirakan akan berdampak pada semakin meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan perempuan di 3 desa (Tapil, Umammanu, Kamanggih). Ia memiliki kontribusi terhadap tata pemerintahan lokal demokratis, khususnya dalam memperkuat aspek keadilan sosial. Relevansi rencana aksi dengan program ACCESS tahap II terdapat pada upaya pemberdayaan warga dan organisasinya, mendorong terjadinya aksi interaksi dengan pemerintah dan aktor lainnya. Program ingin mereplikasi kesuksesan koperasi barter yang pernah dikembangkan oleh YAL sebagai alternatif model perekonomian lokal.

**Kabupaten** : **Sumba Timur**

**Nama Lembaga** : **Yayasan Stimulan**

**Judul Concept Paper** : **Judul Concept Paper: PUBLIK BICARA: Memberdayakan Suara Publik yang Tidak Bersuara melalui Interaksi Dinamis (Engagement) Institusi-Institusi Lokal**

**Durasi program** : **30 bulan (2,5 tahun)**

Melalui konsep paper ini, Yayasan Stimulan ingin melihat warga (orang miskin dan perempuan) memperjuangkan hak-hak mereka terhadap layanan dasar dengan memanfaatkan institusi-institusi RT/RW, lembaga profesi, pemuda dan agama yang ada disekitarnya. Institusi dan lembaga tersebut menyediakan mekanisme complain yang mudah diakses dan ramah orang miskin-perempuan, dan membangun kerjasama dengan media untuk menyebarluaskan informasi. Sementara itu, masyarakat dan media lokal melakukan penilaian regular (3 atau 6 bulanan) terhadap perkembangan kinerja layanan public di kabupaten Sumba Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut, Stimulan akan mengembangkan strategi-strategi seperti riset aksi, advokasi, publikasi dan penguatan kapasitas. Stimulan akan menggandeng Institusi RT/RW (pengelola complain warga), lembaga profesi, pemuda dan agama (melakukan penjangkauan aspirasi dan pendukung RT/RW), dan lembaga pemerintahan desa/kelurahan (memfasilitasi penyaluran complain dan mediator) sebagai mitra dalam mewujudkan impiannya. Pendekatan Appreciative Inquiry dan Asset Based Thinking akan dipergunakan untuk mengefektifkan proses. Rencana aksi ini diharapkan akan menyumbang pada terwujudnya situasi dimana warga, khususnya orang miskin dan perempuan di Sumba Timur memperoleh akses layanan dasar yang berkualitas yang didukung oleh pemerintahan yang pro aktif, aspiratif dalam memproses dan menyediakan berbagai kebijakan dan layanan public untuk warga. Sumbangannya terhadap tata pemerintahan lokal yang demokratis terutama pada terwujudnya aspek kualitas pelayanan publik. Gagasan ini sangat relevan dengan ACCESS Tahap II karena mengandung unsur pemberdayaan warga, khususnya warga miskin dan perempuan, mendorong terjadinya aksi interaksi dengan pemerintahan setempat dan mengandung aspek perluasan dampak dan replikasi karena secara bertahap dalam lima tahun diprediksikan akan menjangkau semua desa di Sumba Timur.

**Kabupaten** : **Sumba Timur**

**Nama Lembaga** : **YCM - YASALTI-KOPPESDA - WANLIP**

**Judul Concept Paper** : **Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Partisipatif**

**Durasi program** : **2,5 tahun**

Konsep paper ini menggambarkan rencana aksi yang bertujuan mendorong warga desa dan organisasinya menjadi lebih berdaya untuk melakukan interaksi aktif dengan pemerintahan lokal dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan warga desa. Secara khusus, rencana aksi ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMdes memiliki kapasitas yang memadai. Warga khususnya orang miskin, perempuan, kaum muda dan kaum tak berdaya lainnya mampu menganalisis kondisi, potensi yang ada dan dapat

memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Warga berelasi setara dalam mengakses ruang publik dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak kewarganegaraan. Antara warga, pemerintahan, OMS dan pengusaha swasta lain dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten saling mempercayai melalui pola kemitraan yang egaliter (antar strata dan jender). Kolaborasi antara Yayasan Cendana Mekar, Yayasan Wali Ati, KOPPESDA dan WANLIP akan mengembangkan pendekatan penguatan kapasitas, advokasi, pendampingan perencanaan dan penganggaran serta training kepemimpinan perempuan. Mitra program dari kerja kolaborasi ini adalah fasilitator desa (276 delegatus), fasilitator pendamping (21 delegatus) dan pemerintah desa untuk mewujudkan tujuan diatas. Apabila Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Partisipatif terwujud diharapkan akan dapat menyumbang terwujudnya Tata pemerintahan lokal yang demokratis, khususnya pada aspek partisipasi. Program ini berada pada arah strategis ACCESS tahap II karena mendorong pemberdayaan warga dan organisasinya, menggagas aksi interaksi antar stakeholder dan mengandung unsur replikasi pendekatan CLAPP dan perluasan pengaruh di seluruh Sumba Timur yakni di 68 desa pada tahun pertama dan di 76 desa pada tahun kedua.